

***DETERMINANTS OF FINANCIAL STATEMENTS QUALITY  
(EMPIRICAL STUDY IN LOCAL GOVERNMENT OF JAMBI PROVINCE)***

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI)**

**Oleh:**

**Evi Hidayakh<sup>1)</sup>, Sri Rahayu<sup>2)</sup>, Muhammad Gowon<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020,*

<sup>2&3)</sup>*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*

Email: [evy\\_hidayah@yahoo.com](mailto:evy_hidayah@yahoo.com)<sup>1)</sup> [srijambi@gmail.com](mailto:srijambi@gmail.com)<sup>2)</sup> [Gowon@unja.ac.id](mailto:Gowon@unja.ac.id)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*The objectives of this research are to describe, and analyze the influence of human resources quality, data quality, and top management support on the quality of local government financial report in Jambi Province. The sample of this research is 60 people that consist of the head of subdivision of finance, treasurer of expenditures, and 1 financial staff at the 20 OPD in Jambi Province. The analysis technique that will be used is multiple linear regression using SPSS. The results showed that 72% of OPD financial staff in Jambi Province were bachelor degree with an average work experience is more than 10 years. The results of t test indicate that the quality of human resources and the quality of data partially have positive effect on the quality of local government financial reports. Meanwhile, top management's support has no effect on the quality of local government financial reports. The results of F test carried out showed that the simultaneous quality of human resources, top management's support, and quality of data had a significant effect on the quality of local government financial reports.*

*Keyword: Quality of Human Resources, Top Management's Support, Data Quality, Quality of Financial Reports.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh kualitas sumberdaya manusia, kualitas data, dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Sample penelitian ini berjumlah 60 yang terdiri Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan 1 orang staf keuangan pada 20 OPD di Provinsi Jambi. Teknik analisis yang akan digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72% pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi merupakan lulusan Strata 1 dengan rata-rata pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas data secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan kualitas data berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Kualitas SDM, Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Data, LKPD

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP 71, 2010). Saat ini terdapat fenomena dalam perkembangan sektor publik di Indonesia yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik lembaga pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2006). Menurut Manossoh (2015), implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang adil, transparansi, dan akuntabel.

Bastian (2010) menyatakan bahwa pada umumnya kualitas informasi akuntansi organisasi sektor publik di Indonesia kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh hasil audit atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Sumatera yang memperoleh LKPD dengan hasil WTP sedikit (BPK RI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas LKPD di Provinsi Jambi. Perolehan nilai opini audit pemerintah Provinsi Jambi tahun 2014-2018 secara rinci disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Opini (Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi) Tahun 2012-2018**

| No | Entitas              | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Prov. Jambi          | WTP-DPP    | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 2  | Kota Jambi           | WDP        | TMP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 3  | Batanghari           | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 4  | Sarolangun           | WDP        | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 5  | Merangin             | WDP        | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 6  | Kerinci              | WTP-DPP    | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 7  | Kota Sungai Penuh    | WTP-DPP    | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 8  | Bungo                | WDP        | WDP        | WDP        | WDP        | WTP        |
| 9  | Tebo                 | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 10 | Ma. Jambi            | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 11 | Tanjung Jabung Barat | WDP        | TMP        | TMP        | TMP        | WTP        |
| 12 | Tanjung Jabung Timur | WDP        | WDP        | WDP        | WTP        | WTP        |

Sumber: BPKRI, 2019

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa kualitas LKPD kabupaten, kota, dan provinsi di Lingkungan Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini disimpulkan dari semakin meningkatnya LKPD yang memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK. LKPD Provinsi Jambi sendiri memperoleh WTP dari tahun 2015 hingga 2018, namun terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami penurunan kualitas LKPD dengan penurunan opini dari WTP ke WDP. Perubahan tersebut membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor yang membuat kualitas LKPD tidak selalu baik.

Menurut Alfian (2015), tidak diperolehnya opini WTP oleh pemerintah daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kelemahan sistem pengendalian internal, belum tertatanya barang milik negara atau daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Indriasih (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah dilaksanakan oleh manusia. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Ulfa (2017) dan Evicahyani (2016), dimana kedua hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et al* (2014) menghasilkan kondisi yang

berbeda dimana kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah tidak dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia.

Faktor yang menentukan kualitas LKPD selain kompetensi sumber daya manusia adalah dukungan manajemen puncak. Pimpinan OPD selaku manajemen puncak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan yang berlaku pada OPD tersebut. Salah satu wewenang tersebut adalah terkait laporan keuangan. Hasil penelitian Rahayu (2012) membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak. Sementara itu hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Al-Hiyari *et al* (2013), dimana dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan manajemen puncak tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi.

Penelitian yang dilakukan Rahayu (2012) juga membuktikan bahwa selain dukungan manajemen puncak, kualitas yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut karena laporan keuangan disusun berdasarkan data keuangan yang dikumpulkan dari transaksi yang terjadi, sehingga semakin baik data yang digunakan diharapkan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Hiyari *et al* (2013), dimana hasil penelitian tersebut tidak

membuktikan bahwa kualitas data berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian seperti yang telah dijabarkan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu dan tempat penelitian. Hal ini menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Menemukan determinan LKPD pada Pemerintahan Provinsi Jambi sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan peningkatan dan menjaga konsistensi kualitas LKPD Provinsi Jambi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kualitas data berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan kualitas data berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu. Suwardjono (2015) menyatakan bahwa akuntansi merupakan seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu.

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan (Arif, 2002). Selanjutnya, Halim dkk (2012) mendefinisikan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Menurut Halim (2012) karakteristik akuntansi pemerintahan adalah berbeda dengan akuntansi bisnis,

tidak ada laporan laba, anggaran merupakan plafond, menggunakan lebih dari satu dana, sangat tergantung pada undang-undang, tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan pada neraca.

#### 2.1.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah atau organisasi lainnya.

Shahan (2008) menyatakan bahwa tujuan dasar dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, menekankan bahwa informasi yang disajikan dapat berguna jika laporan keuangan menunjukkan realitas ekonomi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Keempat karakteristik berikut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

##### a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi espektasi mereka di masa lalu.

##### b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
  - a. Penyajian jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas  
Informasi diarahkan ada kebutuhan umum dan tidak berihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 Opini yang akan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opini*)  
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)

Menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan aktor utama dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam peningkat kualitas LKPD. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam proses penyusunan LKPD maka semakin baik pula LKPD yang dihasilkan. Selain kualitas sumber daya manusia, data merupakan faktor penting dalam penyusunan LKPD. Data merupakan input atau bahan penyusun LKPD, sehingga dengan kualitas data yang baik diharapkan output LKPD yang dihasilkan juga berkualitas baik. Faktor pendukung dalam proses penyusunan LKPD adalah dukungan manajemen puncak. Kepala OPD memiliki wewenang dalam membuat kebijakan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Bila dukungan manajemen puncak semakin baik diharapkan semua faktor penentu kualitas LKPD dapat bekerja dengan lebih baik sehingga LKPD yang dihasilkan semakin memiliki kualitas yang baik.

## 2.3. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>2</sub> : Dukungan Manajemen Puncak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>3</sub> : Kualitas Data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek yang diteliti dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan dibagian keuangan setiap OPD di Provinsi Jambi.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sample pada penelitian adalah 3 orang pegawai yakni kasubbag keuangan, bendahara pengeluaran, dan 1 orang staf keuangan pada 20 OPD yang ada di Provinsi Jambi.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Variabel dan definisi operasional setiap variabel pada penelitian ini secara ringkas dijabarkan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Definisi Operasional**

| Varibel  | Definisi Operasional   | Indikator   |
|--|--|---|
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)       | Terpenuhinya karakteristik laporan keuangan pemerintah sesuai PP 71 Tahun 2010                                     | 1. Relevan (KLKPD1)<br>2. Andal (KLKPD2)<br>3. Dapat dibandingkan (KLKPD3)<br>4. Dapat dipahami (KLKPD4)                          |
| Kualitas Sumber Daya Manusia (X <sub>1</sub> ) | kemampuan seseorang atau individu, dalam satu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya | 1. Banyak pelatihan (KSDM1)<br>2. Lama Penggunaan (KSDM2)<br>3. Kualitas pelatihan yang diikuti (KSDM3)                           |
| Kualitas Data (X <sub>2</sub> )                | Baik buruknya data yang digunakan dalam proses laporan keuangan  | 1. Valid (KD1)<br>2. Mudah didapat (KD2)<br>3. Legal (KD3)  |
| Dukungan Manajemen Puncak (X <sub>3</sub> )    | Keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku guna mencapai tujuan organisasi                               | 1. Keterlibatan dalam pembuatan LKPD (DMP1)<br>2. Perhatian terhadap LKPD (DMP2)<br>3. Dukungan meningkatkan kualitas LKPD (DMP3) |

#### 3.3. Metode Analisis

##### 3.3.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Umar (2008) menyatakan bahwa uji validitas dapat digunakan untuk mengetahui apabila ada pertanyaan pada kuisisioner yang perlu dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Pengujian validitas kuisisioner pada penelitian ini menggunakan pendekatan *pearson product moment* dengan mengkorelasikan skor tiap butir pertanyaan (sebagai variabel X) dengan skor total (variabel Y).

##### 3.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keabsahan suatu kuisisioner penelitian sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berulang kali pada waktu yang berbeda. Menurut Durianto *et al* (2001), uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan suatu kuisisioner penelitian. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan nilai Cronbach Alpha dari masing-masing instrument.

##### 3.3.3. Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel telah berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji

*Kolmogorov Smirnov*. Uji ini memiliki konsep dasar membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku.

###### b. Uji Autokorelasi

Sumodiningrat (2010) mendefinisikan autokorelasi sebagai hubungan (korelasi) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun dalam rangkaian ruang. Menurut Ghazali (2013), pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*.

###### c. Uji Multikolinieritas

Adanya hubungan linier diantara variabel bebas dalam model regresi tidak boleh terjadi karena akan menyebabkan nilai R<sup>2</sup> yang tinggi dan lebih banyak variabel bebas yang tidak signifikan daripada variabel bebas yang signifikan (Gujarati, 1995). Hubungan linier ini dapat ditunjukkan dengan multikolinieritas. Uji multikolinieritas pada penelitian ini adalah menggunakan uji klien matriks korelasi.

###### d. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu uji asumsi regresi linier yang harus dipenuhi adalah homogenitas varians dari error. Menurut Ghazali (2013), uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual. Pengujian

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser.

### 3.3.4. Transformasi Data

Transformasi data merupakan kegiatan menaikkan data dengan skala ordinal menjadi skala interval (Hidayat, 2005). Transformasi data dilakukan dengan menggunakan metode *successive interval*.

### 3.3.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \mu$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan pemerintah daerah

$\alpha$  = intercept

$\beta_{1,2,3}$  = parameter variabel independen

$x_1$  = kualitas sumber daya manusia

$x_2$  = dukungan manajemen puncak

$x_3$  = kualitas data

Adapun uji statistik yang dilakukan meliputi pengujian:

- a. Uji Koefisien Determinasi
- b. Uji F
- c. Uji t

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan pemerintahan dengan bantuan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Setiap OPD sebagai pengguna anggaran menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugas OPD yang bersangkutan. Setiap OPD bertugas membantu pemerintah Provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### 4.1.2. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data primer, jumlah responden yang diambil pada penelitian ini ada 60 responden yang terdiri dari kasubbag keuangan, bendahara pengeluaran, dan 1 orang staff keuangan pada 20 OPD di Provinsi Jambi. Karakteristik responden disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

| Karakteristik                | Jumlah | Persentase (%) |
|------------------------------|--------|----------------|
| <b>1. Tingkat Pendidikan</b> |        |                |
| a. SMU                       | 1      | 2              |
| b. D3                        | 4      | 7              |

|       |    |    |
|-------|----|----|
| c. S1 | 43 | 72 |
| d. S2 | 12 | 20 |

### 2. Latar Belakang Pendidikan

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| a. MIE       | 1  | 2  |
| b. Akuntansi | 12 | 20 |
| c. Manajemen | 17 | 28 |
| d. MIPA      | 11 | 18 |
| e. Pertanian | 5  | 8  |
| f. Lainnya   | 14 | 23 |

### 3. Umur

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| a. 26-35 Tahun | 5  | 8  |
| b. 36-45 Tahun | 25 | 42 |
| c. 46-55 Tahun | 24 | 40 |
| d. > 55 Tahun  | 6  | 10 |

### 4. Lama Bekerja

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| a. < 5 Tahun    | 0  | 0  |
| b. 5 – 10 Tahun | 24 | 40 |
| c. > 10 Tahun   | 36 | 60 |

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa 72% pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi merupakan sarjana pada tingkat strata 1 dan 20% merupakan lulusan Strata 2. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi merupakan orang yang berpendidikan tinggi sehingga diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pengelola keuangan seharusnya merupakan orang yang memiliki kemampuan dibidang pengelolaan keuangan, Secara latar belakang pendidikan, lulusan ekonomi lebih diutamakan untuk melakukan pengelolaan keuangan karena dianggap telah memiliki teori dasar yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan. 50% pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan dari ekonomi baik itu magister ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Sementara itu, 50% lainnya memiliki latar belakang pendidikan yang lain. Selain latar belakang pendidikan ekonomi, kemampuan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan melalui berbagai pelatihan yang dapat diikuti oleh pegawai pengelola keuangan.

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi berada pada usia produktif. Menurut BPS (2019), klasifikasi usia produktif yakni 15 tahun hingga 64 tahun. Rentang usia terbanyak yaitu 36 hingga 45 tahun yakni sebesar 42%. Kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan akan semakin meningkat seiring dengan waktu lamanya seseorang bekerja. Peningkatan kemampuan ini dapat berasal dari pelatihan yang diikuti maupun pengalaman selama melakukan pekerjaan. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa 60% pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi telah bekerja lebih dari 10 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola keuangan yang ada telah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidangnya.

#### 4.1.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan uji statistic non parametric *Kolmogorov-Sminov* (K-S), dengan membandingkan nilai *asymptotic significance*  $\alpha$  5%. Dasar penarikan kesimpulan data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic significance* lebih besar dari 0.05. Hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Sminov* disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Sminov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 60                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 0.000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1.52101228              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | 0.138                   |
|                                  | Positive       | 0.138                   |
|                                  | Negative       | -0.077                  |
| Test Statistic                   |                | 0.138                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | 0.066 <sup>c</sup>      |

Sumber: *Data Primer (Diolah), 2019*

Hasil uji *Kolmogorov-Sminov* pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Sminov* adalah sebesar 0.138 dan nilai *asymptotic significance* sebesar 0.066. Nilai *asymptotic significance* yang lebih besar dari 0.05 berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal.

##### 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

| Model | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | 0.905 <sup>a</sup> | 0.820    | 0.810             | 1.561222                   | 1.972         |

a. Predictors: (constant), X3, X2, X1

b. Dependnt Variabel: Y2

Sumber: *Data Primer (Diolah), 2019*

**Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas**

| Model         | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|               | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| (Constant)    | 1.385                       | 0.821      |                           | 1.687  | 0.097 |
| Kualitas SDM  | 0.036                       | 0.023      | 0.261                     | 1.584  | 0.119 |
| DMP           | -0.035                      | 0.056      | -0.101                    | -0.621 | 0.537 |
| Kualitas Data | -0.089                      | 0.068      | -0.189                    | -1.310 | 0.196 |

Sumber: *Data Primer (Diolah), 2019*

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel kualitas SDM, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kualitas Data secara berurutan adalah 0.119, 0.537, dan 0.196. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel tidak signifikan pada 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model empiris dalam penelitian bebas dari heterokedastisitas.

##### 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Pengujian terhadap ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value atau variance inflation factors (VIF),

dengan dasar penarikan kesimpulannya yaitu jika nilai tolerance value dibawah 0.10 atau nilai variance inflation factors diatas 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model | Collinearity Statistics |       |
|-------|-------------------------|-------|
|       | Tolerance               | VIF   |
| X1    | 0.621                   | 1.611 |
| X2    | 0.633                   | 1.580 |
| X3    | 0.805                   | 1.242 |

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel X1 (Kualitas SDM), X2 (Dukungan Manajemen Puncak), dan X3 (Kualitas Data) memiliki nilai tolerance diatas 0.10 yaitu 0.621, 0.633, dan 0.805 serta ketiga independen variabel tersebut memiliki variance inflation factors dibawah 10. Hal ini berarti bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.1.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan software spss dengan uji secara keseluruhan (uji F) dan secara parsial (uji t). Rangkuman hasil analisis regresi berganda disajikan pada tabel 8.

**Tabel 8. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

| Independent Variabel | Koefisien Regresi (b) | t-Hitung | Signifikansi        |
|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Constant             | 8.255                 | 5.849    | 0.000               |
| X1                   | 0.461                 | 11.870   | 0.000**             |
| X2                   | -0.049                | -0.503   | 0.617 <sup>ns</sup> |
| X3                   | 0.279                 | 2.394    | 0.020*              |

R<sup>2</sup> = 0.82

F-Hitung = 84.812\*\*

\*\*= sig pada 0.01

\*=sig pada 0.05

ns = tidak signifikan

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari tabel 8 adalah sebagai berikut:

$$Y = 8.255 + 0.461X_1 - 0.049X_2 + 0.279X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b = konstanta
- X<sub>1</sub> = Kualitas Sumber Daya Manusia
- X<sub>2</sub> = Dukungan Manajemen Puncak
- X<sub>3</sub> = Kualitas Data
- e = error

Persamaan yang didapat dari hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta pada

persamaan tersebut adalah sebesar 8.255. Sedangkan koefisien untuk kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan kualitas data secara berurutan adalah 0.461, 0.049, dan 0.279.

1. Nilai F Regresi

Nilai F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai F regresi yaitu sebesar 84.812 dengan signifikansi 0.000. Pengujian memberikan hasil signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan kualitas data secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi.

2. Nilai t Regresi

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel independen yang terdapat dalam model terhadap variabel dependen. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil uji hipotesis 1

Rumusan hipotesis 1 pada penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai koefisien beta variabel kualitas sumber daya manusia yang diperoleh adalah 0.461 pada tingkat signifikansi 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H<sub>1</sub>) diterima.

b. Hasil uji hipotesis 2

Rumusan hipotesis 2 pada penelitian ini adalah dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien variabel dukungan manajemen puncak adalah - 0.049 pada tingkat signifikansi 0.617 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H<sub>2</sub>) ditolak.

c. Hasil uji hipotesis 3

Rumusan hipotesis 3 pada penelitian ini adalah kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Hasil analisis regresi pada tabel 15 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kualitas data adalah 0.279 pada tingkat signifikansi  $0.020 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas data secara signifikan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ( $H_3$ ) diterima.

### 3. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka satu besaran koefisien determinasi maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi hasil analisis regresi disajikan pada tabel 16.

**Tabel 9. Nilai Koefisien Determinasi**

| Model | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0.905 <sup>a</sup> | 0.820    | 0.810             | 1.561222                   |

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai *R square* adalah sebesar 0.820 dan nilai *adjust R square* adalah sebesar 0.810. Koefisien determinasi korelasi (*adjust R square*) yang memiliki nilai positif sebesar 0.810 menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, dan kualitas data mempengaruhi variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 81% dan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Hipotesis 1 ( $H_1$ ) Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas LKPD

Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah mencegah kegagalan dalam penyusunan laporan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hipotesis 1 menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai sehingga diprediksi akan mempengaruhi kinerja termasuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Evicahyani (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas LKPD memiliki tingkat yang tinggi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Jambi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

kualitas sumber daya manusia yang diwakili responden menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan sehingga akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Pengelola keuangan di OPD Provinsi Jambi tercatat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, lamanya pengelola keuangan pada OPD di Provinsi Jambi juga membuat mereka memiliki pengalaman yang lebih dalam melakukan pengelolaan keuangan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama para pengelola keuangan harus terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mereka susun. Menurut Ulfa (2017), terdapat 3 kriteria kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku.

### 4.2.2. Hipotesis 2 ( $H_2$ ) Dukungan Manajemen Puncak Berpengaruh Positif terhadap Kualitas LKPD

Manajemen puncak dalam hal ini pimpinan OPD merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Manajemen puncak memiliki wewenang yang mumpuni dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesis 2 menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hipotesis 2 penelitian ini ditolak, yang artinya dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena manajemen puncak dalam hal ini pimpinan OPD menjaga untuk tidak terlalu terlibat dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola keuangan bebas dari intervensi manajemen puncak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kamal dan Noermansyah (2015); Al-Hiyari et al (2013); Setyawati (2013) yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### 4.2.3. Hipotesis 3 ( $H_3$ ) Kualitas Data Berpengaruh Positif terhadap Kualitas LKPD

Lee dan Strong (2003) menyatakan bahwa seluruh proses menghasilkan data (pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data) harus berjalan dengan baik agar kualitas data yang digunakan dapat diproses dengan baik agar mencapai hasil yang berkualitas. Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima yang artinya kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Patongai dkk (2019), dan Norwahidah (2014) yang menyatakan bahwa kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik kualitas data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki OPD pada pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Dukungan manajemen puncak secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen puncak dalam hal ini pimpinan OPD pada pemerintahan kurang memperhatikan proses penyusunan laporan keuangan sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kualitas data secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan sebagai input dalam penyusunan laporan keuangan merupakan data yang telah sesuai dengan kriteria data yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas output yang dihasilkan yaitu kualitas laporan keuangan.
4. Kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan kualitas data secara simultan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 5.2. Saran

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Menyempurnakan hasil penelitian dengan responden yang betul-betul paham dan terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mencari pengukuran lain atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan opini pihak eksternal misalnya melakukan review atas laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh APIC, sehingga bias hasil penelitian dapat diminimalkan.

Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis XVIII* (3). ISSN: 1979-6471.

Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Evicahyani, Sagung Inten, dan Nyoman Djinar Setiawina. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403-428.

Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the effectiveness of government Internal control toward the Quality of financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20).

Karmila, Tanjung, A.R, dan Darlis E. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot*, 9(9). Lembaga Penelitian Universitas Riau.

Manossoh, Hendrik. 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Government Governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(05). 777-789.

Rahayu, S.K. 2012. The Factors that Support the Implementation of Accounting Information System: a Survey in Bandung and Jakarta's Taxpayer Offices. *Journal of Global Management*, 4, issue 1.

Ulfa, Refiana, Raden Andi Sularso, dan Yosefa Sayekti. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, II(2), 176-186.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Hiyari, A.M.H, Al-Mashregy, NKN Mat, dan J.M Alekam. 2013. Factors that Affect accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: a Survey in University Utara Malaysia. *American Journal of Economics*, 3(1), 27-31.
- Alfian, Mohammad. 2015. Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan keuangan pada Satuan Kerja